

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Di Wilayah Polres Pidie)

Permasalahan Narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multi sektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif, multidisiplin, koordinasi dan keterpaduan lintas sektor serta partisipasi masyarakat termasuk peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Polres Pidie Aceh.

Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia, Bagaimana Peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di wilayah Polres Pidie terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, Bagaimana hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah Polres Pidie terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Penelitian ini merupakan deskriptis analitis yang mengarah pada metode pendekatan Yuridis normatif. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statory Approach*) yang dilakukan Dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.. Upaya yang dilakukan oleh Polres Pidie Upaya prefemtif, Upaya preventif, upaya represif meliputi penangkapan dan pengeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, melakukan investigasi serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka. Adapun penyalahgunaan narkotika yang di dapatin oleh Polisi di kerenakan adanya faktor lingkungan pergaulan.

Kata Kunci : Narkoba, Perlindungan Masyarakat, Polres Pidie

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN PROVIDING PROTECTION TO THE COMMUNITY FROM CRIME NARCOTICS AND PSYCHOTROPICS (Case Study in the Pidie Police Area)

The drug problem is a complex problem, which requires comprehensive mitigation efforts involving multi-disciplinary, multi-sector cooperation and active community participation which is carried out continuously, consistently and consistently. Therefore, overcoming it requires a comprehensive, multidisciplinary approach, cross-sector coordination and integration as well as community participation, including the role of the Police in providing protection to the community from narcotics and psychotropic crimes in the jurisdiction of the Pidie Aceh Police.

The problems in writing this thesis are: how is the legal regulation of criminal acts of narcotics and psychotropic abuse in Indonesia, what is the role of the police in providing legal protection for the community in the Pidie Police area against criminal acts of narcotics and psychotropic abuse, what are the obstacles faced by the police in providing legal protection to community in the Pidie Police area regarding the abuse of narcotics and psychotropic substances.

This research is an analytical descriptive that leads to a normative juridical approach method. The approach method used in this research is the statutory approach (Statory Approach) which is carried out by examining all laws and regulations relating to legal issues.

The scope of criminal law includes three provisions, namely criminal acts, accountability and punishment. The criminal provisions contained in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is formulated in Chapter XV of Criminal Provisions Articles 111 to Article 148. Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, there are four categories of unlawful acts which are prohibited by law and can be threatened with criminal sanctions. criminal abuse and illicit trafficking of narcotics, carrying out investigations and investigating criminal acts of abuse and illicit trafficking of narcotics to determine the perpetrators as suspects. As for narcotics abuse

Keywords: Drugs, Community Protection, Pidie Police